



# Strategi Bank Daerah dalam Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR): Studi pada BPD Bali

Diah Wiyastari

Universitas Udayana

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penguatan ekonomi daerah melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pendekatan manajemen strategis. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada BPD Bali. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan KUR di BPD Bali disusun berdasarkan mandat organisasi dan selaras dengan visi dan misi bank sebagai lembaga keuangan daerah. Strategi tersebut mencakup perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penguatan administrasi kredit dan manajemen risiko, serta peningkatan kualitas layanan operasional. Implementasi strategi KUR didukung oleh komitmen manajemen internal dan kebijakan pemerintah, namun masih menghadapi kendala berupa risiko kredit bermasalah serta kompleksitas prosedur administrasi kredit. Meskipun demikian, program KUR terbukti memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi daerah, terutama dalam meningkatkan kapasitas usaha UMKM dan memperluas kesempatan kerja. Penelitian ini merekomendasikan penguatan digitalisasi layanan perbankan dan peningkatan pendampingan UMKM guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program KUR di daerah.

**Kata kunci:** Strategi, Bank Pembangunan Daerah, Kredit Usaha Rakyat, Manajemen Strategis, Ekonomi Daerah.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3664>

\*Correspondence: Diah Wiyastari

Email: [diahwiyastari@gmail.com](mailto:diahwiyastari@gmail.com)

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the strategy of Regional Development Banks (BPD) in strengthening regional economic development through the People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) program using a strategic management approach. The research employs a descriptive qualitative method with a case study conducted at BPD Bali. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the KUR implementation strategy at BPD Bali has been formulated based on organizational mandates and aligned with the bank's vision and mission as a regional financial institution. The strategy includes expanding access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), strengthening credit administration and risk management, and improving the quality of operational services. The implementation of the KUR strategy is supported by strong management commitment and government policies (however, it still faces challenges such as non-performing loan risks and administrative complexity). Overall, the KUR program has a positive impact on regional economic strengthening, particularly in enhancing MSME business capacity and expanding employment opportunities. This study recommends strengthening service digitalization and enhancing MSME mentoring to improve the effectiveness and sustainability of the KUR program at the regional level.

**Keywords:** Strategy, Regional Development Bank, People's Business Credit, Strategic Management, Regional Economy.

## Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi daerah adalah keberadaan lembaga keuangan yang mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian daerah karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan (Suryani & Setiawan, 2021). Dalam konteks ini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan daerah (*agent of regional development*) yang mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian lokal (Adi & Nugroho, 2020) (Rahman & Yusuf, 2022) (Sari & Nugroho, 2020).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang layak usaha namun memiliki keterbatasan agunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah (Bryson, 2018) (Kurniawan & Lestari, 2020). Bank daerah, termasuk BPD Bali, menjadi salah satu penyalur utama KUR karena memiliki kedekatan institusional dan pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik ekonomi lokal serta pelaku UMKM di daerah (Astuti & Prabowo, 2021). Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan KUR sangat ditentukan oleh strategi yang diterapkan oleh bank daerah dalam menyalurkan pembiayaan tersebut.

Namun demikian, pelaksanaan program KUR di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi risiko kredit bermasalah, kompleksitas administrasi kredit, keterbatasan literasi keuangan UMKM, serta tuntutan untuk tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Kondisi ini menuntut bank daerah untuk memiliki strategi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penyaluran kredit, tetapi juga pada keberlanjutan program serta dampaknya terhadap penguatan ekonomi daerah (Putri & Sudiana, 2022) (Rahmawati & Hidayat, 2021).

Dalam perspektif administrasi publik, bank daerah dapat dipandang sebagai organisasi publik atau semi-publik yang memiliki mandat ganda, yaitu menjalankan fungsi bisnis sekaligus fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, pendekatan manajemen strategis menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana bank daerah merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah, termasuk program KUR (Aristanto, 2024) (A. Wibowo & Hidayat, 2023). Pendekatan ini menekankan pentingnya keselarasan antara mandat organisasi, visi dan misi, analisis lingkungan, serta formulasi dan implementasi strategi dalam merespons isu-isu strategis yang dihadapi organisasi publik (Arnola et al., 2025) (Tambunan, 2019) (E. Wibowo, 2022).

BPD Bali sebagai bank milik Pemerintah Provinsi Bali memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah yang didominasi oleh UMKM (Hasan Jan et al., 2024).

Penyaluran KUR oleh BPD Bali tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan dalam memperkuat struktur ekonomi daerah (Thuda et al., 2024). Data Statistik Perbankan Indonesia menunjukkan bahwa peran BPD dalam pembiayaan UMKM terus meningkat dan menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan akses permodalan dan kinerja UMKM, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengukuran dampak ekonomi dan efektivitas program secara kuantitatif (Kurniawan & Lestari, 2020) (Suryani & Setiawan, 2021). Penelitian yang secara khusus mengkaji strategi Bank Pembangunan Daerah sebagai aktor pembangunan daerah, terutama dalam penyaluran KUR, masih relatif terbatas (Astuti & Prabowo, 2021). Selain itu, kajian KUR dari perspektif manajemen strategis dalam konteks administrasi publik juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada strategi manajemen strategis BPD Bali dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi, sebagai upaya untuk mengisi kekosongan penelitian serta memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan ekonomi daerah.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya penguatan ekonomi daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi proses, makna, serta dinamika strategi organisasi secara kontekstual sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di BPD Bali dengan fokus pada strategi manajemen strategis dalam penyaluran KUR yang mencakup tahapan perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi (Creswell & Poth, 2020).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif. Wawancara dilakukan terhadap informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penyaluran KUR di BPD Bali guna memperoleh informasi terkait proses perumusan strategi, pelaksanaan strategi di lapangan, serta evaluasi dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran KUR. Observasi non-partisipatif dilakukan untuk memahami alur penyaluran KUR serta praktik operasional yang mendukung implementasi strategi tersebut. Penggunaan teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi penyaluran KUR, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap penguatan ekonomi daerah (Yin, 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis untuk dianalisis menggunakan kerangka manajemen strategis. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan hasil observasi guna memastikan kredibilitas dan konsistensi data penelitian (Miles et al., 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Umum BPD Bali dan Program KUR

Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Bali yang didirikan dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat (Sari & Nugroho, 2020). Sebagai bank daerah, BPD Bali memiliki peran ganda, yaitu sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan usaha dan sebagai instrument kebijakan publik daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Bank Pembangunan Daerah Bali, 2022, Bank Pembangunan Daerah, 2023).

Dalam menjalankan perannya, BPD Bali menempatkan pembiayaan UMKM sebagai salah satu focus utama kegiatan operasionalnya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi bank yang menekankan pada pemberdayaan sektor UMKM dan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan. Pembiayaan UMKM dipandang sebagai instrument strategis untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan ekonomi daerah (Sari & Nugroho, 2020).

Salah satu bentuk dukungan BPD Bali pengembangan UMKM adalah melalui pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program pembiayaan yang diinisiasi oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMKM yang layak namun belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perbankan konvensional. Dalam program ini, pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi Bunga dan dana penjaminan kredit, sehingga risiko pembiayaan bagi bank penyalur dapat diminimalisir.

Sebagai bank penyalur KUR, BPD Bali berperan dalam menyalurkan kredit produktif kepada pelaku UMKM di wilayah Provinsi Bali. Penyaluran KUR dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku, serta disesuaikan dengan karakteristik ekonomi daerah dan sektor usaha yang berkembang (Astuti & Prabowo, 2021) (Astuti & Prabowo, 2021) (Rahman & Yusuf, 2022). Proses penyaluran KUR melibatkan berbagai unit kerja, mulai dari analisis kelayakan usaha, administrasi kredit, hingga pengelolaan risiko dan pengawasan kredit.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan program KUR di BPD Bali tidak hanya difokuskan pada penyaluran kredit semata, tetapi juga pada upaya menjaga kualitas kredit dan keberlanjutan usaha debitur. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses administrasi kredit, termasuk pengelolaan dokumen dan hak tanggungan, sebagai bagian dari strategi pengendalian risiko.

Dalam konteks penguatan ekonomi daerah, program KUR yang disalurkan oleh BPD Bali berperan sebagai instrument strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan skala usahanya, memperbaiki produktivitas, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Bank Indonesia, 2021).

## **Strategi BPD Bali dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Strategi Bank Pembangunan Daerah Bali dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dianalisis menggunakan kerangka manajemen strategis yang dikemukakan oleh Bryson, yang meliputi tahapan perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana BPD Bali merespons mandat organisasi dan isu strategis dalam mendukung penguatan ekonomi daerah melalui pembiayaan UMKM (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

### **1. Perumusan Strategi Penyaluran KUR**

Perumusan strategi penyaluran KUR di BPD Bali dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi bank, mandat organisasi, serta karakteristik ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyaluran KUR dirancang untuk menjangkau pelaku UMKM yang memiliki potensi usaha produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Dalam tahap ini, BPD Bali menetapkan prioritas sektor usaha yang dinilai memiliki prospek dan sesuai dengan kondisi ekonomi lokal.

Perumusan strategi juga memperhatikan kebijakan pemerintah terkait KUR serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Strategi tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan internal dan pedoman operasional yang menjadi acuan bagi unit kerja dalam proses penyaluran kredit. Dengan demikian, perumusan strategi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga disesuaikan dengan kapasitas organisasi dan risiko yang dihadapi (Peraturan Presiden No.2 Tahun 2022).

### **2. Implementasi Strategi KUR**

Implementasi strategi penyaluran KUR di BPD Bali melibatkan berbagai unit kerja yang saling terkoordinasi, mulai dari pemasaran kredit, analisis kelayakan usaha, hingga administrasi kredit. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi strategi dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan penyaluran kredit. Proses administrasi kredit dan pengelolaan hak tanggungan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kredit dan meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Dalam implementasinya, BPD Bali juga menyesuaikan prosedur penyaluran KUR dengan kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM. Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip manajemen risiko. Selain itu, implementasi strategi penyaluran KUR didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem administrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi proses kredit.

### **3. Evaluasi Strategi Penyaluran KUR**

Evaluasi strategi penyaluran KUR dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan program. Evaluasi mencakup penilaian terhadap capaian penyaluran kredit, kualitas kredit, serta kesesuaian strategi dengan tujuan penguatan ekonomi daerah. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi daerah dan kebijakan pemerintah.

Dalam perspektif manajemen strategis, evaluasi strategi merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan mampu memberikan manfaat optimal bagi organisasi dan pemangku kepentingan (A. Wibowo & Hidayat, 2023). Bagi BPD Bali, evaluasi strategi penyaluran KUR tidak hanya berorientasi pada kinerja keuangan, tetapi juga pada dampak program terhadap pengembangan UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Keberhasilan strategi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi proses perumusan dan implementasi strategi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi penyaluran KUR di Bank Pembangunan Daerah Bali.

#### **1. Faktor Pendukung Strategi Penyaluran KUR**

Salah satu faktor pendukung utama dalam strategi penyaluran KUR di BPD Bali adalah kejelasan mandat organisasi dan dukungan kebijakan pemerintah. Penugasan resmi BPD Bali sebagai bank penyalur KUR memberikan legitimasi dan arah yang jelas dalam pelaksanaan program. Mandat tersebut memudahkan bank dalam menyelaraskan strategi organisasi dengan kebijakan publik di bidang pemberdayaan UMKM (Putra, 2021).

Faktor pendukung lainnya adalah pemahaman dan komitmen sumber daya manusia (SDM) terhadap pelaksanaan program KUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang terlibat dalam penyaluran KUR memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai tujuan dan prosedur program. Komitmen SDM ini mendukung implementasi strategi secara konsisten, terutama dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan administrasi kredit.

Selain itu, dukungan sistem dan prosedur operasional juga menjadi faktor pendukung strategi penyaluran KUR. Adanya pedoman operasional dan sistem administrasi kredit membantu memperlancar proses penyaluran dan pengawasan kredit. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kredit turut meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan strategi.

#### **2. Faktor Penghambat Strategi Penyaluran KUR**

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam strategi penyaluran KUR di BPD Bali. Salah satu hambatan yang sering dihadapi adalah keterbatasan kapasitas administrasi dan pemahaman debitur UMKM. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi kredit, sehingga dapat memperlambat proses penyaluran KUR.

Faktor penghambat lainnya adalah risiko kredit yang melekat pada karakteristik usaha UMKM. Usaha UMKM umumnya memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan usaha skala besar, sehingga memerlukan kehati-hatian ekstra dalam proses analisis dan pengelolaan kredit. Kondisi ini dapat memengaruhi kecepatan dan fleksibilitas penyaluran KUR.

Selain itu, dinamika kebijakan dan perubahan regulasi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan strategi penyaluran KUR. Penyesuaian terhadap kebijakan baru memerlukan waktu dan adaptasi dari sisi organisasi maupun pelaku UMKM. Hal ini dapat memengaruhi konsistensi implementasi strategi, terutama dalam jangka pendek.

Dalam perspektif manajemen strategis, faktor pendukung dan penghambat tersebut merupakan bagian dari lingkungan internal dan eksternal organisasi yang perlu dianalisis secara berkelanjutan. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut penting bagi BPD Bali untuk melakukan penyesuaian strategi agar penyaluran KUR dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung penguatan ekonomi daerah.

### **3. Dampak Program KUR terhadap Penguatan Ekonomi Daerah**

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan berbagai dampak terhadap penguatan ekonomi daerah, khususnya melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dampak program KUR dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu peningkatan kapasitas usaha UMKM, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.

Salah satu dampak utama program KUR adalah meningkatnya akses permodalan bagi pelaku UMKM. Kemudahan akses pembiayaan memungkinkan pelaku usaha untuk menambah modal kerja, meningkatkan skala produksi, serta memperbaiki kualitas produk dan layanan. Akses permodalan yang lebih baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di tingkat daerah (Suryani & Setiawan, 2021).

Selain itu, program KUR juga berdampak pada peningkatan keberlanjutan usaha UMKM. Dengan dukungan pembiayaan yang relatif terjangkau, pelaku UMKM memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempertahankan usahanya dalam menghadapi dinamika ekonomi. Keberlanjutan usaha ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di sektor produktif.

Dampak lain yang teridentifikasi adalah terciptanya dan bertambahnya kesempatan kerja di tingkat lokal. Pengembangan usaha UMKM yang didukung oleh KUR mendorong kebutuhan tenaga kerja tambahan, sehingga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja di daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan penguatan ekonomi daerah yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan pengurangan tingkat pengangguran.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, program KUR juga berperan dalam mendorong perputaran ekonomi lokal. Pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM umumnya digunakan untuk aktivitas usaha yang berbasis pada sumber daya dan pasar lokal. Kondisi ini menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih luas.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak program KUR terhadap penguatan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi strategi penyaluran kredit. Strategi yang tepat sasaran, pengelolaan risiko yang baik, serta pendampingan usaha menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa KUR benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

Dengan demikian, program KUR yang disalurkan oleh BPD Bali dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam penguatan ekonomi daerah. Dampak positif yang dihasilkan menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan publik dan strategi organisasi bank daerah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan sesuai mandat organisasi sebagai agen pembangunan daerah melalui penerapan manajemen strategis yang meliputi perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi daerah dan kebutuhan UMKM. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian administrasi publik dengan menempatkan bank daerah sebagai organisasi publik yang menjalankan kebijakan pembiayaan UMKM melalui proses strategis internal. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan KUR ditentukan tidak hanya oleh kebijakan kredit, tetapi juga oleh strategi pengelolaan sumber daya, risiko, dan hubungan dengan UMKM. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif, fokus pada satu objek penelitian, serta tidak digunakannya data kuantitatif. Oleh karena itu, disarankan agar BPD Bali memperkuat pendampingan UMKM, pemerintah daerah meningkatkan sinergi kebijakan, dan penelitian selanjutnya menggunakan metode kuantitatif atau campuran dengan cakupan objek yang lebih luas.

## Daftar Pustaka

- Adi, I. R., & Nugroho, R. (2020). Kebijakan publik dan peran lembaga keuangan daerah dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 123–138.
- Aristanto, E. (2024). Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(1), 2841. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i1.2841>
- Arnola, A., Ramadhan, S., Pratama, Y., Efendi, M. R., & Fadilah, M. (2025). Peran perbankan dalam mendukung permodalan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 3(1), 2570. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v3i1.2570>
- Astuti, Y., & Prabowo, H. (2021). Strategi bank daerah dalam mendukung pembiayaan UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1), 45–59.
- Bank Indonesia. (2021). *Penguatan UMKM dan ekonomi daerah*. Bank Indonesia.
- Bank Pembangunan Daerah Bali. (2022). *Laporan Tahunan BPD Bali*. BPD Bali.
- Bank Pembangunan Daerah Bali. (2023). *Laporan Tahunan BPD Bali*. BPD Bali.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2020). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

- Hasan Jan, R., Usman, M. S., Niu, F. A. L., & Karundeng, F. E. F. (2024). The role of sharia-compliant KUR super micro financing in enhancing MSME income and business development: A case study from Bank Syariah Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 9(1), 93–104. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v9i1.12204>
- Kurniawan, B., & Lestari, S. (2020). Evaluasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 89–103.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Roadmap pengembangan UMKM dan pembiayaan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kredit Usaha Rakyat*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- Putra, A. P. (2021). Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 45–58.
- Putri, N. L. P. M., & Sudiana, I. W. (2022). Peran Kredit Usaha Rakyat terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2), 101–114.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2022). Regional development banks and MSME financing in Indonesia. *Journal of Regional Development Studies*, 14(1), 55–68.
- Rahmawati, D., & Hidayat, R. (2021). Manajemen strategis organisasi publik dalam implementasi program pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 67–82.
- Sari, P. R., & Nugroho, A. (2020). Peran Bank Pembangunan Daerah dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(2), 215–228.
- Suryani, E., & Setiawan, D. (2021). Akses pembiayaan UMKM dan penguatan ekonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18(3), 201–215.
- Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan*. Ghalia Indonesia.
- Thuda, A., Hamsal, M., Warganegara, D. L., & Heriyati, P. (2024). Business transformation in a distinctive institutional setting: A study of regional development banks in Indonesia. *Administrative Sciences*, 14(11), 299. <https://doi.org/10.3390/admsci14110299>
- Wibowo, A., & Hidayat, R. (2023). Manajemen strategis organisasi publik dalam implementasi kebijakan ekonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 67–82.
- Wibowo, E. (2022). Akses pembiayaan dan pengembangan UMKM dalam mendukung ekonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 17(2), 101–115.
- Yin, R. K. (2021). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.